

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keuangan Daerah**

##### 1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.<sup>12</sup>

Jenis-jenis laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas, d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Karena akuntansi pemerintahan/ keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses identifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan

---

<sup>12</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hlm. 42.

Ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.<sup>13</sup>

Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

Ruang Lingkup laporan Realisasi Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (*financing*) merupakan setiap penerimaan

---

<sup>13</sup> Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm. 64.

yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

## 2. Pentingnya Laporan Keuangan Daerah

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Pentingnya mempublikasikan laporan keuangan yaitu:<sup>14</sup>

- a) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan, maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepala pegawai pemerintahan daerah dan DPRD.
- b) Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada daerah, kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak yang lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut

---

<sup>14</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 2

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

### 3. Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan publikasian yang terdapat dikoran atau situs pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih seksama. Laporan keuangan publikasian merupakan intisari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklarifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong baik atau tidak, kita dapat melihatnya dari laporan keuangan.

Adapun garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :<sup>15</sup>

- a) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
- b) Untuk alat akuntabilitas publik

---

<sup>15</sup> Mahmudi, *Analisi Laporan ...*, hlm. 4

- c) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja menejerial dan organisasi.

#### 4. Kebutuhan Informasi Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok pengguna (general purposive), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a) Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- b) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah terpenuhi dengan baik.
- c) Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat rasio berinvestasi, kondisi kesehatan

---

<sup>16</sup> Mahmudi, *Analisi Laporan ...*, hlm. 9.

finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas daerah.

- d) DPRD dan kelompok politik informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara.
- e) Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

## **B. Pengukuran Kinerja**

### **1. Pengertian Pengukuran Kinerja**

pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.<sup>17</sup>

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat*, (Yogyakarta : CV Andi, 2009), hlm. 121.

ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.<sup>18</sup>

Pengukuran kinerja adalah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.<sup>19</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

## 2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan dilakukan penilaian kinerja disektor publik adalah:

### a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang

---

<sup>18</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*, (Yogyakarta :CV Andi, 2015), hlm. 6.

<sup>19</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor...*, hlm. 275.

mestinya. pemimpin dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.

b) Menyiapkan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka berlandak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap. *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak.

c) Memperbaiki kinerja periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi didalam organisasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik dari pada sekarang.<sup>20</sup>

d) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan

keputusan pemberian *reward* dan *punishment* Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.

---

<sup>20</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja...*, hlm. 14.

e) Memotivasi Pegawai

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

f) Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan diaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang dipublikasikan bagi pihak internal maupun eksternal.<sup>21</sup>

3) Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja adalah :

- a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

---

<sup>21</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja ...*, hlm. 14.

- d) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- e) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- f) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
- g) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.<sup>22</sup>

### C. Efektivitas

#### 1. Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah *output* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.<sup>23</sup>

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.<sup>24</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor ...*, hlm. 122.

<sup>23</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor ...*, hlm. 78

<sup>24</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja ...*, hlm. 86.

## 2. Pengukuran Efektivitas

pengukuran efektifitas mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.<sup>25</sup>

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Kinerja pemerintah dikatakan efektif apabila rasio antara 100% s/d >100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:<sup>26</sup>

$$R \quad E = \frac{R}{A} \frac{P}{P} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

<sup>25</sup> Mahsun, *Pengukuran Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*, (Yogyakarta :BPEF, 2006), hlm. 182.

<sup>26</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan ...*, hlm. 141.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Selanjutnya *Trend* Efektivitas penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas. Suatu daerah Otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat dan peluang akan menuju efektivitas.

Persentase *Trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka presentase dari tahun dasar.<sup>27</sup>

Analisis *Trend* Efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas tersebut. Apabila presentase *Trend* Efektivitas lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan Efektivitas. Semakin besar persentase *trend* Efektivitas

---

<sup>27</sup> Doni Saputra, *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat*, (padang : Universitas Negeri Padang, 2014).

di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas.

Dalam penelitian ini, tahun 2015 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan Efektivitas pada tahun berikutnya (Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018). Dengan demikian *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan mengimplementasikan reformasi otonomi dan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini maka *trend* Efektivitas dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Trend Efektivitas} = \frac{E}{E} \frac{T_{hu} P_t}{T_{hu} D} \times 100$$

#### D. Efisiensi

##### 1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah input yang tersedia mampu menghasilkan output pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan.<sup>28</sup>

Efisiensi merupakan output tertentu yang dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan

---

<sup>28</sup> Indra Bastian, Akuntansi Sektor ..., hlm. 85.

perbandingan antara output dengan input yang dihasilkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumberdaya (input) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma dan dengan biaya yang serendah-rendahnya.

## 2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.<sup>30</sup>

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio antara 60% s/d 79% dan < 60%, semakin rendah rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin tinggi rasio efisiensi berarti semakin buruk atau tidak efisien. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor ...*, hlm. 132.

<sup>30</sup> Mahsun, *Pengukuran Akuntansi Sektor ...*, hlm. 183.

<sup>31</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan ...*, hlm. 164.

$$R \quad E = \frac{R}{A} \frac{B}{B} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Persentase Pengukuran</b>	<b>Kriteria Efisiensi</b>
Di Atas 100%	Tidak Efisien
90% - 99%	Kurang Efisien
80 %- 89%	Cukup Efisien
60% - 79%	Efisien
Di bawah 60 %	Sangat Efisien

Selanjutnya Efisiensi penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan. Suatu daerah otonom kabupaten / kota pada suatu tahun tertentu barang kali belum dapat memenuhi efisiensi tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efisiensi yang sangat efisien.

Persentase *Trend* digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka presentase dari tahun dasar.<sup>32</sup>

Analisis *Trend* Efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas tersebut. Apabila presentase *Trend* Efisiensi lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan Efisiensi. Semakin besar persentase *trend* Efisiensi di

<sup>32</sup> Doni Saputra, *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat*, (padang : Universitas Negeri Padang, 2014).

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan Efisiensi.

Dalam penelitian ini, tahun 2015 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan Efisiensi pada tahun berikutnya (Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018). Dengan demikian *trend* yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan mengimplementasikan reformasi otonomi dan keuangan daerah.

Dari penjelasan ini maka *trend* Efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Trend Efisiensi} = \frac{E_{T \text{ hu } Pt}}{E_{Tahu D}} \times 100$$

## E. Anggaran

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.<sup>33</sup>

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 191.

<sup>34</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sketor ...*, hlm. 61.

Dari Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi tisuhan pengeiuaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk meiyani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, priorotas dari pengguna dana dan pertanggung jawaban kepada publik.

## 2. Pentingnya Anggaran

Pentingnya Anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi. menjamin kesinambungan. Dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terns berkembang, sedangkan sumber yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), piiihan (*choice*), dan *trade offs*.
- c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah teiah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sketor ...*, hlm. 63.

## **F. Pendapatan Daerah**

### 1. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.<sup>36</sup>

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS).

#### a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah. Sesuai dengan jiwa otonomi daerah. Maka kepada pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber-sumber yang ada di daerah masing-masing, sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan azas desentralisasi yang kita anut.

#### b) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 29 tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

---

<sup>36</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan ...*, hlm. 99.

Sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu pemendagri nomor 13 tahun 2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- 1) Pendapatan hibah
- 2) Pendapatan dana darurat
- 3) Pendapatan lainnya.<sup>37</sup>

## **G. Belanja**

### **1. Pengertian Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.<sup>38</sup>

### **2. Konsep Belanja Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Definisi lain Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

---

<sup>37</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan ...*, hlm. 99.

<sup>38</sup> Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan ...*, hlm. 65.

a) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi.<sup>39</sup>

c) Belanja modal

Belanja Modal merupakan pengeiuaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Kelompok belanja Modal terdiri dari : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, dan Belanja Gedung dan Bangunan.

## **H. Pandangan Islam Tentang Kinerja Keuangan Daerah**

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat

---

<sup>39</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan ...*, hlm. 75.

pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama beberapa periode anggaran.<sup>40</sup>

Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkan dalam bentuk padaha dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberikannya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazhabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Kahfi ayat 87-88 yang berbunyi :

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكْرًا {87} وَأَمَّا مَنْ آمَنَ  
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ ۖ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا {88}

*Artinya : "... Barang siapa berbuat dzalim, kami akan menghukumnya, lalu dia dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan Mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan ..."*<sup>41</sup>

Penilaian kinerja dalam Pandangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an yaitu :<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ima Amaliah, Aan Julia, dan Westi Riani, *Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja, Jurnal Mimbar*. Vol 29 No. 3 (2013), hlm.167

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Terjemah ..., hlm. 303.

<sup>42</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 182.

1. Keadilan, kompetensi (QS. An-Nissa ayat 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>43</sup>

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntun hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inhern melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Al-Qur'an dan Terjemah ..., hlm. hlm. 83.

<sup>44</sup> Lantip Susilowati, *Mensyariahkan Akuntansi Konvensional*, Jurnal An-Nisbah, Vol.04, No. 01, 2017.

2. Kejujuran (Q.S Al-Maidah ayat 8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.<sup>45</sup>

3. Usaha (Q.S An-Najm ayat 39)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.<sup>46</sup>

4. Inisiatif, pengalaman kerja (QS. Ar-Rad ayat 11)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ...

Artinya : “...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”.<sup>47</sup>

5. Kreativitas individu (QS. Al-Zukhruf ayat 32).

أَمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۚ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌۢ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan Terjemah ..., hlm. 108.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 572.

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 250.

*kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>48</sup>

Firman Allah dalam QS. Al-Ahqaaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya : "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada merugikan.”*<sup>49</sup>

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 39 :

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

*Artinya : “Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan”.*<sup>50</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya segala kebutuhan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala

<sup>48</sup> Al-Qur'an dan Terjemah ..., hlm. 491.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 825.

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 155.

(balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.

## **I. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Pramita<sup>51</sup> yang bertujuan untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013, Metode Penelitian menggunakan Analisis Rasio, Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan dengan tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, Tingkat Keserasian, Tingkat Pertumbuhan, Tingkat Kemandirian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46 %, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82%, (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal Fluktuatif. (5) Rasio Kemandirian Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Intruktif karena rata-rata rasionalnya sebesar 7,8%.

Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode

---

<sup>51</sup> Puput Riski Pramita, *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja keuangannya yaitu Tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, Tingkat Keserasian, Tingkat Pertumbuhan, dan Tingkat Kemandirian, sedangkan Variabel yang saya teliti hanya menggunakan dua variabel yaitu Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan ditinjau dari Perspektif Islam.

Pramono<sup>52</sup> penelitian ini bertujuan bertujuan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta. Dalam penelitian, Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2011. Selanjutnya data akan di analisis dengan menggunakan enam Rasio Keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan mengembalikan pinjaman. Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandirian sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), Rasio Belanja Modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07 % (2011). Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efektif dan efisien, karena Rasio Efektivitasnya 94,81 % (2010) dan

---

<sup>52</sup> Joko Pramono, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*, Vol.7 No. 13, Juli 2014.

102,79 % (2011) sedangkan rasio Efisiensinya 27,95% (2010) dan 14.15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92 %. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DCSR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011). Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja keuangannya yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan mengembalikan pinjaman. Sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan dua variabel yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi kinerja keuangan ditinjau dari perspektif Islam.

Penelitian Assidiqi<sup>53</sup> yang bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012 dan mengetahui Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten periode 2008-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>53</sup> Bahrin Assidiqi, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten tahun 2008-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03% (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%. Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja

keuangannya yaitu analisis dengan menggunakan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah : 1) Analisis Varians Pendapatan Daerah, Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah, Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah. Selain itu juga menggunakan Analisis Kinerja Belanja Daerah : 1) Analisis varians Belanja Daerah, 2) Analisis Keserasian Belanja Daerah dan 3) Analisis Efisiensi Belanja Daerah., sedangkan Variabel yang saya teliti hanya menggunakan dua variabel yaitu Tingkat Efektifitas dan Efisiensi kinerja Keuangan ditinjau dari Perspektif Islam.

Penelitian Putri<sup>54</sup> yang bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas, Kemandirian, Desentralisasi Keuangan Daerah menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dalam periode tahun 2008-2017. Variabel dalam peneltian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan parameter berupa rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi serta *trend* setiap masing-masing rasio. Teknik analisis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah data APBD Kota Bandar Lampung setiap tahunnya. Sampel dalam penelitian ini adalah data APBD Kota Bandar Lampung pada 10 tahun terakhir yaitu tahun 2008-2017. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rasio efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada 90,495% dengan kategori efektif dengan *trend* efektivitas keuangan

---

<sup>54</sup> Riri Sepryaningrum Putri, *Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Kinerja Keuangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

daerah berada pada 70,814% selama periode tahun 2008-2017. 2) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 27,966% dikategorikan rendah dengan *trend* kemandirian keuangan daerah berada pada 262,429% selama periode tahun 2008-2017. 3) Rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah secara rata – rata berada pada 17,85% dengan kategori kurang baik dengan *trend* desentralisasi fiskal keuangan daerah berada pada 197,237% selama periode tahun 2008-2017. Kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tetapi belum maksimal bila dilihat dari hasil perhitungan kinerja keuangan daerah. Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja keuangannya yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Desentralisasi Fiskal mengembalikan pinjaman. Sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan dua variabel yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi kinerja keuangan ditinjau dari Perspektif Islam.

Penelitian Harahap<sup>55</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2011-2015 dilihat dari : (1) Rasio Efektivitas PAD, (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, (3) Rasio Keserasian, (4) Rasio Pertumbuhan, dan (5) Rasio

---

<sup>55</sup> Anggra Z Harahap, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Study Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011-2015)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DIPPEKADE) Kabupaten Pakpak Bharat. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kekeragaman, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Pakpak Bharat jika dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan sangat kurang dikarenakan karena rata rata rasio nya masih berada diinterval 0,00% - 10,00% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong pola hubungan instruktif karena berada pada interval 0% - 25% (3) Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan sudah efektif karena rata rata efektivitasnya sudah melebihi 100% (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masih dinilai kurang efisien karena masih berada pada interval 90%-100% (5) Rasio Kekeragaman bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio dari belanja modal menjadi relatif kecil. Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja keuangannya yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah, Rasio Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan dua variabel yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan ditinjau dari Perspektif Islam.

Rahayu<sup>56</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Trenggalek jika dilihat dari Rasio Keuangan Daerah. Populasi dalam Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Trenggalek dimana sampel yang diambil adalah empat tahun terakhir (2012-2015). Adapun variabel yang diteliti meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan sebagai variabel bebas secara kinerja keuangan daerah sebagai variabel terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten Trenggalek dilihat dari :

- 1)Rasio Kemandirian daerah sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan pembangunan, karena hasil rata – rata kemandiriannya sebesar 245,61%,
- 2)Rasio Efektivitas dapat dikategorikan efektif, karena hasil rata-rata efektivitasnya 99,20%,
- 3)Rasio Efisiensi daerah tergolong sangat efisien, karena rata-rata besar rasio ini sebesar 1,04%,
- 4) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi

---

<sup>56</sup> Apri Diana Eka Rahayu, *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Study Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012-2015)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

daerah rata-rata yaitu sebesar 85,33% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%, 5) Rasio pertumbuhan PAD, Belanja Operasi, Belanja Pertumbuhan, hasil rata-rata menunjukkan pertumbuhan positif yang artinya sangat baik. Persamaan dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Metode Penelitian Analisis Rasio, dan Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih banyak menggunakan variabel dalam kinerja keuangannya yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan PAD. Sedangkan penelitian yang saya teliti menggunakan dua variabel yaitu Rasio Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan ditinjau dari Perspektif Islam.

#### **J. Kerangka Konseptual**

Kerangka Pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sedangkan LRA adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terdiri dari tingkat kemandirian

keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal.

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin efektif atau semakin baik, Semakin rendah rasio Efisiensi maka menggambarkan kemampuan daerah semakin Efisien.

**Gambar 2.1**

**Kerangka Konseptual**

